

Peran Dinas Perikanan dan Peternakan OKUS Dalam Mendukung Program Minapolitan Budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS

Rakhmat Saleh, M.I.P

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja
Jalan Ki Ratu Penghulu Karang Sari No. 02301 Telpn (0735) 326122 Fax.321822
Baturaja – 32115 OKU Sumatera Selatan
Email : rakhmatsaleh24@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian yang dilaksanakan pada 19 April – 26 April 2018 ini menggunakan metode deskriptif kualitatif data dikumpulkan melalui, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, aspek pengarah pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan dalam mendukung program Minapolitan budidaya di pemerintahan daerah Kabupaten dan Dinas-Dinas terkait pelaksana program pengembangan kawasan Minapolitan ini dirasa sudah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Akan tetapi itu dari segi kemampuan saja untuk pelaksanaannya petugas lapangan seperti pendamping lapangan dan monitoring ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Jumlah petugas yang kurang ini menjadi kendala dari instansi pelaksana program Minapolitan ini. Kurangnya sumberdaya dalam kebijakan minapolitan ini juga dikeluhkan oleh kepala bidang penyuluhan beserta staffnya dalam menangani program pengembangan kawasan Minapolitan ini walaupun mereka sudah bekerja secara maksimal. Terkait petugas penyuluh lapangan ataupun pendamping yang ada di Warkuk Ranau Selatan yang kurang melakukan penyuluhan dan monitoring ke lapangan ini juga menjadi kendala terlaksananya program kebijakan ini menjadi baik. Dalam sumberdaya waktu ini memang ada beberapa pernyataan yang berbeda dalam menilai tetang rentang waktu ataupun target dari pelaksanaan program pengembangan Kawasan Minapolitan ini. Dinas Perikanan dan Peternakan menilai sudah cukup waktu target yang di tetapkan.

Kata Kunci: Peran , Dinas Perikanan dan Peternakan Minapolitan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan wilayah merupakan salah satu bentuk transformasi suatu wilayah sebagai bagian dari eksplorasi sumber daya alam untuk menciptakan daya saing tinggi terhadap suatu daerah. Pengembangan wilayah juga merupakan bagian penting dalam pembangunan suatu daerah. Pengembangan wilayah pada umumnya dilakukan oleh suatu daerah untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pengembangan wilayah harus dilakukan dengan baik, sehingga diperlukan adanya komitmen daerah serta peran aktif dari masyarakat sebagai pihak yang menikmati pengembangan wilayah tersebut.¹

Minapolitan merupakan istilah yang asing bagi masyarakat umum, namun bagi pelaku aktif bidang perikanan istilah minapolitan bukan lagi menjadi hal asing semenjak tahun 2009 seiring dengan digulirkannya Program Minapolitan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengguliran Program Minapolitan ini bukannya tanpa latar belakang. Adanya pergeseran kerangka berpikir untuk melakukan pertimbangan pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia, melahirkan kebijakan yang berorientasi dari pembangunan darat ke

pembangunan maritim atau perairan. Reorientasi kerangka berpikir dalam konsep pembangunan inilah yang akhirnya mendorong suatu bentuk terobosan dan inovasi yang bernama Revolusi Biru dengan tujuan pengoptimalisasian pemanfaatan sumberdaya perairan tanpa meninggalkan kegiatan pelestariannya.

Pada tataran implementasi, Minapolitan akan dilaksanakan melalui sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep yang dinamakan Minapolitan. Dari sudut etimologisnya minapolitan terdiri dari dua kata yaitu mina yang berarti ikan dan politan yang berarti kota, yang jika disatukan memiliki arti sebagai kota perikanan. Minapolitan diharapkan dapat mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Percepatan ini utamanya adalah di daerah pedesaan, karena pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kelautan perikanan di wilayah pedesaan amat lambat perkembangannya. Ini bisa dimaklumi jika melihat pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia, kurangnya kemudahan-kemudahan, sarana prasarana, dan fasilitas umum di wilayah pedesaan. Keterbatasan-keterbatasan di wilayah pedesaan tersebut tidak lantas membuat suatu desa bisa ditetapkan sebagai sasaran Minapolitan, karena setidaknya suatu desa harus memiliki karakteristik dan persyaratan tertentu untuk ditetapkan sebagai desa sasaran program Minapolitan.

Kabupaten OKUS sendiri, adalah salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang turut berperan aktif mensukseskan Minapolitan. Penetapan Kabupaten OKUS

¹ Rustiadi, *et al.* *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009. Hal :12

sebagai Kawasan Minapolitan tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan SK Bupati OKU Selatan Nomor : 203 Tahun 2006 tentang Unit Pengembangan Perikanan (UPP). Kawasan Minapolitan ini berlokasi di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Banding Agung. Kawasan ini terdiri dari wilayah perairan yaitu Danau Ranau (\pm 12.000 Ha) dan wilayah daratan (\pm 10.000 Ha). Komoditas unggulannya yaitu budidaya ikan nila hitam (*Tilapia Nilatica R*) dan produksi yang dihasilkan saat ini mencapai 125 ton/tahun.¹ Kawasan sentra perikanan (minapolitan) yang terletak di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.²

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan Minapolitan, terutama prinsip integrasi, pelaksanaan Minapolitan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Warkuk Ranau Selatan bukan menjadi hal yang mustahil untuk diwujudkan apabila dalam pelaksanaannya mendapat dukungan pemangku kepentingan, baik instansi sektoral, pemerintah pusat dan daerah. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Minapolitan adalah revitalisasi kelembagaan penyuluhan perikanan; mengembangkan struktur dan SDM penyuluhan perikanan, serta meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh perikanan.

Peran dinas Perikanan Dan Peternakan sangat penting dalam kegiatan budidaya pada skala menengah dan kecil. Penyuluhan dan bimbingan teknologi minabisnis merupakan kelembagaan formal yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perikanan setempat. Sosialisasi penerapan cara budidaya ikan yang baik (*good aquaculture practices*) terus dilakukan oleh para penyuluh sebagai upaya penyiapan pelaku utama dan pelaku usaha untuk selalu mengutamakan kualitas dan peduli lingkungan dalam budidaya perikanan di era globalisasi.

Pengembangan teknologi tepat guna yang cocok di kawasan minapolitan merupakan tujuan utama para penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugasnya. Penyuluh mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mentransfer teknologi dan informasi yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan. Penyuluh di Kabupaten OKUS mempunyai potensi yang cukup baik dalam memberikan informasi dan teknologi tersebut, namun mereka memiliki banyak kendala dalam kapasitasnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang peran Dinas Perikanan dan Peternakan OKUS dalam mendukung program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan.³ Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas, maka permasalahan

pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dinyatakan dengan pertanyaan penelitian yaitu:” Bagaimanakah peran Dinas Perikanan dan Peternakan OKUS dalam mendukung program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian sosial dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Terdapat tiga tujuan yang paling umum dan paling berguna dalam penelitian yaitu: eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif.⁴ Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mendeskriptif peran Dinas Perikanan dan Peternakan OKUS dalam mendukung program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan suatu penelitian yang hendak dicapai.⁵ adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang peran Dinas Perikanan dan Peternakan OKUS dalam mendukung program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi Dinas Perikanan dan Peternakan OKUS dalam mendukung program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS.
- c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi peneliti lainnya yang ingin lebih njauh lagi mengkaji mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi ini merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Peran merupakan salah satu komponen dari konsep diri.

Cangara menyepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan lakon seorang pelaku dalam panggung sandiwara sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap skenario, instruksi, dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton,

¹ Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKUS Tahun 2013

² Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2012

³ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013. Hal: 288

⁴ Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta Prenamedia Group. 2015. Hal:34

⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta. 2010. Hal : 97

serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama.¹

Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang individu juga harus patuh pada skenario, yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah. Dalam Kanfer menyebutkan 5 aspek penting dari peran, yaitu:²

1. Peran itu bersifat impersonal.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja.
3. Peran itu sulit dikendalikan.
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan menghasilkan perubahan perilaku.
5. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama

Menurut Effendy peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan dimana dapat dimiliki pribadi atau kelompok-kelompok.³ Istilah peran sering diucapkan banyak orang. Kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh seorang aktor dalam suatu drama. Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁴

2.2. Minapolitan

Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan dengan prinsip: integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.⁵ jadi bisa dikatakan bahwa minapolitan adalah suatu kegiatan peningkatan perikanan yang teratur. Minapolitan merupakan kerangka berpikir dalam pengembangan agribisnis berbasis perikanan di suatu daerah. Minapolitan adalah wilayah yang berisi sistem agribisnis berbasis perikanan dengan penggerakannya usaha agribisnis. Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, perumahan dan kegiatan terkait lainnya. Sub sistem pengembangan minapolitan yang berbasis perikanan. Pengembangan minapolitan tetap mencakup pengembangan ke empat sub sistem dari sistem dan usaha agri bisnis berbasis perikanan.⁶

Konsep dasar pengembangan Kawasan Minapolitan adalah upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (*rural-urban linkage*) yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam system perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi

masyarakat lokal/perdesaan sangat penting, dengan diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal melalui pengembangan ekonomi komunitas, investasi *social capital* dan *human capital*, investasi di bidang prasarana dan sumberdaya alam (*natural capital*).⁷ Pengembangan kawasan Minapolitan dilakukan dengan disertai upaya peningkatan *capacity building* di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan agar menjamin manfaat utama dapat dinikmati masyarakat lokal.⁸

Minapolitan masuk dalam kategori Agropolitan dijelaskan bahwa Kawasan Agropolitan/Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian/perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.⁹

Dijelaskan pula pada pasal 26 bahwa rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrument pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian/perikanan, yang dapat berbentuk kawasan agropolitan/Minapolitan. Melalui pendekatan penataan ruang diharapkan keterkaitan kawasan agropolitan/Minapolitan dengan sistem kota dan outlet pemasaran dalam suatu struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah menjadi jelas dan terintegrasi dengan RT/RW kabupaten yang ada. Selanjutnya mengacu dan menyelaraskan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 maka *masterplan* Kawasan kawasan agropolitan/Minapolitan disebut juga dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan agropolitan/Minapolitan yang adalah merupakan rencana rinci dari RTRW kabupaten. Minapolitan terdiri dari kata mina dan kata politan (polis).

Mina berarti perikanan dan politan berarti kota, sehingga Minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Secara definitif Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan.¹⁰

Minapolitan didefinisikan sebagai konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.¹¹ Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan

¹ Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu komunikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hal:7

² Effendy, Onong. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013 Hal:23

³ Soerjono, Soekonto. *Peangantar penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia. 2009. Hal: 60

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005. Hal: 854

⁵ Widjaja, Sjarif. *Pengembangan Kawasan Minapolitan*. Diakses 6 November 2018

⁶ <http://karyatulisilmiah.com/pengertianminapolitan/> diakses 6 November 2017

⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan.

⁸Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan

⁹ Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

¹⁰ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Rencana Induk Pengemb. Kawasan Minapolitan.

¹¹ Peraturan Menteri No 12 tahun 2010 tentang Minapolitan

jasa, dan/ atau kegiatan pendukung lainnya. Sesuai dengan KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan atas Keputusan MKP No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, telah ditetapkan 223 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia sebagai Kawasan Minapolitan yang sebelumnya berjumlah 197 Kawasan Minapolitan. Kawasan yang telah diprioritaskan akan dibagi dalam jangka waktu 2010-2014 dengan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap. Tahun 2011 ditetapkan 9 kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap dan 24 kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya.

Untuk mendukung program tersebut Pemerintah pusat dalam hal ini KKP telah menganggarkan beberapa kegiatan serta melakukan serangkaian koordinasi sebagai bentuk komitmen KKP untuk mendukung kawasan Minapolitan. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan antara pusat (K/L terkait) dan daerah terutama kesiapan daerah untuk mensukseskan Minapolitan. Dalam perkembangannya, telah ditetapkan Kepmen KP Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan menjadi 179 Kabupaten Kota dengan 202 lokasi yang dibagi menjadi 145 Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya dan 57 Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap.

2.2.1. Tujuan Minapolitan

Dalam minapolitan terdapat beberapa tujuan yaitu:¹

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas.
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata.
3. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Secara umum minapolitan bertujuan untuk peningkatan, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan ekonomi.

2.2.2. Karakteristik Minapolitan

Minapolitan terdapat beberapa karakteristik, yaitu terdiri dari sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan dan mempunyai multiplier effect tinggi terhadap perekonomian disekitarnya sebagai berikut:²

1. Mempunyai keanekaragaman kegiatan ekonomi, produksi, perdagangan, jasa pelayanan, kesehatan dan sosial yang saling terkait.
2. Mempunyai sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktifitas ekonomi sebagai layaknya sebuah kota.

2.3.3. Persyaratan Minapolitan

Wilayah yang bisa dilakukan peningkatan perikanan/minapolitan terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu:³

1. Komitmen Daerah : ditetapkan Bupati/Walikota sesuai perencanaan strategis.
2. Komoditas Unggulan : Seperti udang, patin, rumput laut dan lainnya.
3. Letak Geografis : Lokasi strategis dan secara alami.

4. Sistem dan Mata Rantai : Keberadaan sentra produksi yang aktif seperti lahan budidaya dan pelabuhan perikanan.
5. Kelayakan Lingkungan : Tidak merusak lingkungan

2.2.4. Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan

Dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan secara terintegrasi, perlu disusun *masterplan* pengembangan kawasan minapolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan. Adapun muatan yang terkandung didalamnya adalah:⁴

1. Penetapan pusat minapolitan yang berfungsi sebagai:⁵
 - a. Pusat perdagangan dan transportasi perikanan (*aquacultural trade/transport center*).
 - b. Penyedia jasa pendukung perikanan (*aquacultural support services*).
 - c. Pasar konsumen produk non-perikanan (*non aquacultural consumers market*).
 - d. Pusat industri perikanan (*aqua based industry*).
 - e. Penyedia pekerjaan non perikanan (*non-aquacultural employment*).
 - f. Pusat minapolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten.
2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai:⁶
 - a. Pusat produksi perikanan (*aquacultural production*).
 - b. Intensifikasi perikanan (*aquacultural intensification*).
 - c. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non-perikanan (*rural income and demand for non-aquacultural goods and services*).
 - d. Produksi ikan siap jual dan diversifikasi perikanan (*cash fish production and aquacultural diversification*).
3. Penetapan sektor unggulan
Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sector hilirnya. Kegiatan minabisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal). Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.

4. Dukungan sistem infrastruktur

Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan diantaranya: jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).

5. Dukungan sistem kelembagaan

Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan minapolitan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dengan fasilitasi

⁴ Ibid, Sjarif. 2013

⁵ Made, L. Nurjana. *Petunjuk Teknis*". Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, Departemen Perikanan: Jakarta. 2006. Hal:20

⁶ Ibid. Hal:23

¹ Ibid, Sjarif. 2013

² Ibid, Sjarif. 2013

³ Ibid, Sjarif. 2013

pemerintah pusat. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan minapolitan. Melalui keterkaitan tersebut, pusat minapolitan dan kawasan produksi perikanan berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi kawasan minapolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan.¹

2.3. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Perikanan dan Peternakan

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :²

- a. Perumusan kebijakan program Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan;
- b. Pengarah pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
- d. Pengkoordinasian pengkajian alternatif pemecahan masalah atas konsep atau naskah dinas di bidang perikanan dan peternakan sebagai bahan kebijakan teknis pimpinan;
- e. Pemberian saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.4. Peran Dinas Perikanan dan Peternakan

Berdasarkan Kedudukan Dinas Perikanan Dan Peternakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 pasal 55

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan.
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perikanan dan peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan;

- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang perikanan dan peternakan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Minapolitan adalah revitalisasi kelembagaan penyuluhan perikanan; mengembangkan struktur dan SDM penyuluhan perikanan, serta meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh perikanan. Peran dinas Perikanan Dan Peternakan sangat penting dalam kegiatan budidaya pada skala menengah dan kecil.³ Penyuluhan dan bimbingan teknologi minabisnis merupakan kelembagaan formal yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perikanan setempat. Sosialisasi penerapan cara budidaya ikan yang baik (*good aquaculture practices*) terus dilakukan oleh para penyuluh sebagai upaya penyiapan pelaku utama dan pelaku usaha untuk selalu mengutamakan kualitas dan peduli lingkungan dalam budidaya perikanan di era globalisasi. Pengembangan teknologi tepat guna yang cocok di kawasan minapolitan merupakan tujuan utama para penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugasnya. Penyuluh mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mentransfer teknologi dan informasi yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan.

Sarana bimbingan dan penyuluhan yang berlokasi di Kabupaten OKUS antara lain:

1. Balai Penyuluhan Perikanan Dan Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang berfungsi sebagai klinik konsultasi, yaitu sebagai sumber informasi, tempat percontohan dan pusat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha perikanan yang lebih efisien dan menguntungkan
2. Balai Benih Ikan (BBI) yang berfungsi sebagai tempat konsultasi teknologi perikanan, sekaligus sumber penghasil benih ikan unggul untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan.

2.5. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan Minapolitan, terutama prinsip integrasi, pelaksanaan Minapolitan di Kabupaten OKU Selatan bukan menjadi hal yang mustahil untuk diwujudkan apabila dalam pelaksanaannya mendapat dukungan pemangku kepentingan, baik instansi sektoral, pemerintah pusat dan daerah. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi minapolitan adalah perumusan kebijakan program dinas perikanan dan peternakan berdasarkan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan pengarah pelaksanaan

³ Yulisti, M dan Triyanti, R. Peran Kelembagaan Dalam Mendukung Program Minapolitan Budidaya di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan *Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 7 No. 1, 2012.*

¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

² Peraturan Bupati No 24 tahun 2017

tugas dinas sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang perikanan dan peternakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam hubungan kerja dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk meneliti objek dengan cara menurunkan, menafsirkan data yang ada, dan pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisis dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi social tertentu.¹ Tipe penelitian deskriptif ini dianggap relevan dipakai karena menggambarkan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang peran Dinas Perikanan dan Peternakan OKUS dalam mendukung program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS.

3.2. Jenis Data

Dalam penelitian ini diperlukan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut ²:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya materi atau dokumen serta melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, majalah, serta karya tulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah Menganalisis Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam mendukung program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan program Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan
- b. Pengarah pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait

3.4. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan penelitian oleh peneliti³. Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) Interview/Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (responden) dengan berbicara langsung dengan orang tersebut. Jadi metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pernyataan kepada responden dan dalam kegiatan wawancara berlangsung pewawancara harus dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lokasi wawancara.

- 2) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala yang kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu secara langsung.

- 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen agenda dan sebagainya yang diperlukan untuk mengetahui tentang permasalahan yang peneliti bahas. Berdasarkan pengertian tersebut, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara memperoleh data dan informasi yang dapat berupa sejarah singkat, visi, misi, motto, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Sugiyono mengemukakan bahwa "aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh".⁴ Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

- a. Reduksi Data

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang

¹ Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta Prenamedia Group. 2015. Hal:37

² Sugiyono. *Op.Cit*. Hal: 308

³ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Alfabetha: Bandung. 2012. Hal:209.

⁴ Sugiyono. *Op.Cit*. Hal: 333

tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir.

b. Sajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan, sebab akibat, kesimpulan perlu diverifikasi agar penelitian yang dilakukan benar dan bisa dipertahankan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Keadaan Wilayah, Geografi, dan Demografi

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Secara geografis, kabupaten yang terbentuk pada tahun 2004 ini, berada di antara 103°22' - 104°21' Bujur Timur dan 04°14' - 04°55' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 549.394 Ha Secara administrasi, Kabupaten OKU Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Muara Enim di sebelah barat, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung di sebelah selatan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan Kabupaten OKU Timur di sebelah timur, serta Kabupaten OKU di sebelah utara Kabupaten OKU Selatan merupakan salah satu kabupaten yang sektor pertaniannya memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian.

Kualifikasi Pendidikan Pegawai Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan

Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
S.I	12	75
D.I	1	6.25
SMA/SMK	3	18.75
Jumlah	16	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 16 pegawai kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan diketahui bahwa pegawai yang merupakan lulusan S.I sebanyak 12 orang (75%), pegawai yang merupakan lulusan D.I sebanyak 1 orang (6,25%), dan pegawai yang merupakan lulusan SMA sebanyak 3 orang (18,75%).

Adapun jumlah atau keberadaan sarana dan prasarana pendukung kantor kecamatan Warkuk Ranau Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4.2
Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

N O	NAMA BARANG	JUMLAH/ KONDISI	TAHUN/SUMBER
1	Mobil dinas	1 unit/baik	2008/hibah Pemkab
2	Komputer	3 unit/baik	2010/hibah Pemkab
3	Laptop dan LCD	6 unit/baik	2011/APBD OKUS
4	Lemari kerja	8 unit/baik	2011/APBD OKUS
5	Meja Kerja/kursi	16/12 unit/baik	2009/APBD OKUS
6	Sofa ruang Camat	1 unit/baik	2010/APBD OKUS
7	Papan Pengumuman	2 unit/baik	2010/APBD OKUS
8	Televisi+Para bola	1 unit/baik	2012/APBD OKUS
9	CCTV	1 unit/baik	2013/APBD OKUS

Sumber: Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, 2018

4.2. Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Perumusan kebijakan program Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan

Dalam pembahasan ini peneliti akan mencoba menggambarkan dan menganalisis peran Dinas Perikanan dan Peternakan OKUS dalam mendukung program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS yang diarahkan oleh model minapolitan adalah budidaya ikan nila dan ikan mas dalam kolam dan keramba. Program minapolitan tidak hanya memfokuskan untuk produksi ikan saja melainkan mempertahankan keunggulan produktifitas dengan melakukan pengolahan hasil perikanan seperti dengan mengerikan ikan asin, usaha ini tidak hanya dilakukan untuk perseorangan melainkan sudah terbentuk dalam usaha yang terhimpun dalam kelompok-kelompok usaha.

Sebagaimana sudah dijelaskan kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagai satu lokasi yang potensial untuk pembudidayaan ikan namun menurut analisis data perikanan kabupaten belum menepati urutan teratas sehingga dengan adanya penetapan kawasan minapolitan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dapat meningkatkan produksi ikan, minat pasar dari kota utama menjadi lebih baik sehingga tercapainya tujuan program minapolitan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan dapat menjadi daerah percontohan untuk perkembangan pembudidayaan ikan di tahap pertama dan dapat mengikuti tahap-tahap berikutnya agar bisa di terapkan di kawasan perikanan lainnya di Kabupaten OKU Selatan.

Dari dimensi perumusan kebijakan program Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan dalam mendukung program Minapolitan budidaya, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu: kejelasan standar dan tujuan program pengembangan kawasan Minapolitan, serta standar dan tujuan yang realistis dengan keadaan pembudidaya ikan yang menerima ataupun mendapatkan bantuan dalam bentuk barang ataupun ilmu.

Standar Perumusan kebijakan program Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan dalam mendukung program Minapolitan budidaya dapat dilihat dengan kesiapan program ini berjalan apakah dokumen perencanaan sudah tercukupi atau belum, observasi awal peneliti menemukan bahwa syarat administratif kebijakan ini belum terpenuhi semua yaitu belum tersusunnya SK Pokja terkait Perumusan kebijakan program Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan tentang kawasan minapolitan. Mengenai aspek Perumusan kebijakan program Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan dalam mendukung program Minapolitan budidaya ini peneliti pertanyakan kepada Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang mengatakan bahwa:¹

“Ya memang pengembangan kawasan Minapolitan ini masih terkendala oleh SK Pokja yang belum tersusun kan tetapi kami memakai perda no 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten OKU Selatan karena semua tertuang di dalamnya. Terlepas dari itu kita berharap dengan adanya program Minapolitan ini dari Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan, akan sangat membantu pembudidaya ikan dan meningkatkan kesejahteraan mereka itu khususnya dan umumnya adalah meningkatkan ekonomi Kabupaten OKU Selatan dengan basis pertanian.”

Sedangkan menurut kepala bagian Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan mengatakan bahwa aspek Perumusan kebijakan program Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai

¹ Wawancara Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, pukul 09.00 WIB

dengan program kerja yang ditetapkan dalam mendukung program Minapolitan budidaya adalah:²

“Dari kebijakan kawasan Minapolitan ini kami mengarapkan agar para pembudidaya ikan yang ada di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan taraf hidup mereka agar dapat meningkat, diantaranya mulai dari kebutuhan dasar mereka dan menjual hasil tani mereka itu dapat terintergrasikan ke satu tempat yang bisa menampung dan menjual hasil tani mereka. Setelah program ini dapat berjalan secara baik mereka lebih maksimal dalam bertani dan memiliki kehidupan yang layak, mengenai sk pokja ini kan menyusul oleh karena itu kami akan terus mempebaiki dan mereview program ini”.

Dari kedua pernyataan di atas, program pengembangan kawasan Minapolitan memiliki tujuan agar masyarakat pembudidaya ikan ini memiliki kehidupan yang layak dan sejatera dengan akan tetapi memang terganjal oleh belum terpenuhinya dokumen syarat administratif yang menjadikan belum berjalannya secara maksimal program ini.

Sementara menurut Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan mengatakan hal yang serupa, bahwa perumusan kebijakan program Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan dalam mendukung program Minapolitan budidaya memiliki tujuan yang baik akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara baik, dengan mengatakan berikut:³

“Jadi begini, program Minapolitan ini memiliki tujuan yang sangat baik, akan tetapi hingga saat ini program ini belum berjalan dengan maksimal , hal ini terjadi dikarenakan program ini belum kuat dalam segi administratif memang ruang wilayah Kecamatan Warkuk Ranau Selatan adalah wilayah pertanian dan perikanan akan tetapi dalam pelaksanaannya itu urusan dinas terkait dalam level pelaksana. ”.

Analisis peneliti dari pernyataan di atas memang begitu adanya yang terjadi di lokasi penelitian bahwa program ini memang belum berjalan secara baik walaupun pengulirannya sudah lama dari tahun 2011. Hal ini yang membuat peneliti merasa janggal dengan program ini, sudah lama diterapkan akan tetapi tingkat keberhasilannya ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh pembudidaya ikan dan pemerintah daerah Kabupaten OKU Selatan.

²Wawancara Kepala bagian umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan, pukul 09:00 WIB

³ Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan pukul 10:30WIB

Selanjutnya pernyataan diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan mengenai ukuran dan tujuan kebijakan program pengembangan Minapolitan yaitu:¹

“Jadi begini Minapolitan itu kan kota perikanan, kalo Dinas Perikanan dan Peternakan untuk kegiatan Minapolitan lebih banyak dalam hal penyuluhan terhadap pembudidaya ikan. Nanti para pembudidaya ikan diberikan pemahaman terkait cara membudidayakan ikan dengan model Minapolitan dan tentunya akan diberikan alat penunjang dalam membudidayakannya. Kita beri mereka bibit, dan alat seperti keramba dan pelampung air.”

Selanjutnya pernyataan serupa diungkapkan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang mengatakan bahwa program pengembangan kawasan Minapolitan merupakan yaitu:²

“ program Minapolitan ini memang ditujukan kepada masyarakat pembudidaya ikan. Jadi nantinya pembudidaya ikan akan dibekali pengetahuan dan system kerja dari Minapolitan ini. Kami akan berkoordinasi dengan pihak Upt Pertanian kecamatan dan Ketua kelompok tani agar nantinya apa yang akan kita sampaikan ini dapat dimengerti oleh msyarakat.”

Dari penjelasan dapat kita ketahui bawasanya program Minapolitan ini memang ditujukan untuk masyarakat pembudidaya ikan yang ada di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Hal ini menjadi hal yang sangat menarik ketika pemerintah kabupaten memfokuskan program ini kepada masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dan masih banyak kendala. Adapun yang diungkapkan oleh Kepala bagian Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yaitu:³

“Kalau kendala untuk saat ini kalau menurut saya itu belum fokus dan belum mempunyai misi yang sama semua SKPD yang terkait dalam

¹ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan pukul 09:00 WIB

² Wawancara dengan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, Pukul 10:30 WIB

³ Wawancara Kepala bagian umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan, pukul 09:30 WIB

melaksanakan program pengembangan kawasan Minapolitan ini. Banyak beranggapan bahwa Minapolitan ini punya Dinas Perikanan dan Peternakan, jadi SKPD yang lain kurang memiliki program itu. Perlu pemahaman dan membuka wawasan bahwa Minapolitan ini bukan punya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan saja ada beberapa dinas yang terkait dalam pengembangan program ini seperti Dinas Pekerjaan Umum misalnya jadi begitu”.

Jadi sudah sangat terlihat bahwa memang program Minapolitan ini masih banyak kendala yang masih harus diselesaikan. Sudah sangat terlihat bahwa permasalahannya yang terjadi dalam pengembangan program Minapolitan ini terkait koordinasi yang belum terjalin dengan baik. pengembangan kawasan Minapolitan ini tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan saja akan tetapi memerlukan bantuan dari dari pihak yang lain untuk bisa menjalankan ataupun mewujudkan kawasa Minapolitan. Kemudian pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten OKUS yang mengungkapkan sebagai berikut:⁴

“Kalo dari pihak Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten OKUS amat sangat sangat mendukung dengan diadakannya program pengembangan kawasan Minapolitan ini, tujuannya juga sangat jelas untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan dan umumnya masyarakat Kabupaten OKU Selatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya dari pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan sendiri kurang melakukan monitoring ataupun turun langsung mensosialisasikan maksud dan tujuan program kebijakan ini sehingga menyebabkan kebingungan dan kurang koordinasi”.

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menganalisis perumusan kebijakan program Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan; penentuan sasaran dan tujuan dinas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan dalam mendukung program Minapolitan budidaya memang memiliki manfaat yang baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat pembudidaya ikan. Akan tetapi yang terjadi adalah program ini belum dapat berjalan sehingga keadaan masyarakatnya belum mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut, hal ini dapat di katakana bahwa program ini sangat baik akan tetapi pelaksanaannya tidak. Ukuran dan tujuan kebijakan ini harus dipahami oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan, bukan hanya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan saja melainkan dukungan dan pemahaman

⁴ wawancara dengan Kepala Balai Benih Ikan (BBI) di Kantor Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten OKUS, pukul 09:00

menganai program Minapolitan ini harus dipahami dan didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Minapolitan ini.

4.2.2. Pengaruh pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan

Keberhasilan dari proses Implementasi kebijakan minapolitan sangat tergantung dari pengaruh pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan dalam mendukung program Minapolitan budidaya kemampuan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang terlaksananya kebijakan tersebut. Ada banyak sumberdaya yaitu sumberdaya manusia, material, mesin, keuangan, informasi dan waktu. Sumberdaya ini tidak serta merta hanya sumberdaya manusia saja. Sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya waktu. Dilihat dari aspek pengaruh pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan dalam mendukung program Minapolitan budidaya peneliti menanyakan mengenai kemampuan sumberdaya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Dinas perikanan dan peternakan Kabupaten OKU Selatan khususnya bidang penyuluhan, Rinail, S.E, selaku Kepala Bidang Penyuluhan mengatakan sebagai berikut:¹

“Kalau sumberdaya manusia di Dinas perikanan dan peternakan Kabupaten OKU Selatan yang menangani program Minapolitan ini saya rasa mampu, mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya”.

Sumberdaya manusia memang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan suatu program karena mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dibutuhkan sumberdaya manusia yang sangat berkopoten. Sama halnya dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan bahwa sumberdaya manusia di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan memiliki kemampuan dalam menangani Program pengembangan Kawasan Minapolitan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:²

“Sejauh ini kita dalam menangani program Minapolitan ini saling mendukung satu sama lain agar program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, adapun kendala yaitu sumberdaya manusia di sini masih kurang belum lagi kita

melakukan monitoring dan pendampingan soalnya jarak yang lumayan jauh. Yang jelas kami kekurangan sumberdaya manusia dalam menjalankan program ini.”

Jika dilihat dari pernyataan kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang mengatakan kurang sumberdaya manusia yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, untuk melakukan monitoring maka sumberdaya yang seharusnya berjumlah berapa orang untuk mengefektifkan dalam hal ini. Adapun penjelasan menurut Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yaitu:³

“Jika melihat jumlah sumberdaya yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan yang menangani program Minapolitan ini memang masih kurang. Jika yang menangani program ini 5 orang mungkin akan lebih baik dan efektif dalam melakukan pendampingan dan penjelasan mengenai program Minapolitan ini di Warkuk Ranau Selatan”.

Menurut pernyataan kepala Dinas Pertanian, bahwa jika yang menangani program Minapolitan ini 5 orang maka dianggap sangat efektif dalam pelaksanaan monitoring di Warkuk Ranau Selatan. Sementara pernyataan kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan menyatakan hal yang sama bahwa kurangnya sumberdaya manusia di di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, dengan pernyataan:⁴

“Memang pegawai kita masing kurang, apalagi seksi tanaman pangan ini hanya memiliki tujuh pegawai Padahal itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan program Minapolitan ini”.

Pernyataan itu dibuktikan pada saat peneliti menanyakan mengenai pelaksanaan pendampingan dan penjelasan kepada staff Bidang Penyuluhan bahwa memang kita sudah melakukan semaksimal mungkin akan tetapi memang jumlah kita yang kurang jadi kurang bisa menangani semua pekerjaan. Adapun sumberdaya manusia yaitu pendamping lapangan program pengembangan kawasan Minapolitan ini memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya hal ini dinyatakan oleh Rinail, S.E selaku kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan, dengan mengatakan:⁵

³ Ibid

¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Penyuluhan di Kantor Dinas perikanan dan peternakan Kabupaten OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan, pukul 13:30 WIB

² Wawancara Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, pukul 10:15 WIB

⁴ Wawancara dengan kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, pukul 10:15 WIB

⁵ wawancara dengan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di

“Pendamping lapangan yang ada merupakan pendamping yang sangat kompeten dapat berkomunikasi dengan lancer yang selalu turun kelapangan untuk menyapaikan dan mengajarkan serta menjelaskan dari cara mekanisme dari konsep Minapolitan”.

Pendamping lapangan untuk Program Pengembangan Kawasan Minapolitan menurut kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akan tetapi pernyataan berbeda diungkapkan oleh Zainudin selaku pembudidaya ikan ketika peneliti menanyakan pendampingan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, dengan mengatakan sebagai berikut:¹

“Ada, tapi itu jarang banget ke sini Cuma ada beberapa kali pas memberikan bantuan bibit ikan dan alat untuk untuk membuat keramba, selebih nya belum pernah kesini dan tidak menjelaskan program Minapolitan itu, kami saja masih belum paham dengan program itu”.

Pernyataan pembudidaya ikan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan itu menunjukkan bahwa pendamping lapangan belum melakukan tugas pokok dan fungsinya secara baik walaupun mereka mempunyai kemampuan yang baik dalam melakukan pendampingan lapangan.

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas, maka sudah jelas terlihat mengenai aspek Pengarah pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan dalam mendukung program Minapolitan budidaya di pemerintahan daerah Kabupaten dan Dinas-Dinas terkait pelaksana program pengembangan kawasan Minapolitan ini dirasa sudah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Akan tetapi itu dari segi kemampuan saja untuk pelaksanaannya petugas lapangan seperti pendamping lapangan dan monitoring ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan kemudian jumlah petugas yang kurang ini menjadi kendala dari instansi pelaksana program Minapolitan ini.

Kurangnya sumberdaya ini juga dikeluhkan oleh kepala bidang penyuluhan beserta staffnya dalam menangani program pengembangan kawasan Minapolitan ini walaupun mereka sudah bekerja secara maksimal. Terkait petugas penyuluh lapangan ataupun pendamping yang ada di Warkuk Ranau Selatan yang kurang melakukan penyuluhan dan monitoring ke lapangan ini juga menjadi kendala terlaksananya program kebijakan ini menjadi baik. Dalam sumberdaya waktu ini memang ada beberapa pernyataan yang berbeda dalam menialai tetang rentang waktu ataupun target dari pelaksanaan program pengembangan Kawasan Minapolitan ini. Dinas Perikanan

Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan pukul 14:20WIB)

¹ wawancara dengan Sukirno, pembudidaya ikan di kecamatan Warkuk Ranau Selatan pukul 10.00 WIB

dan Peternakan menilai sudah cukup waktu target yang di tetapkan.

Terdapat beberapa alternatif upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan dalam mendukung program minapolitan budidaya sebagai upaya pengembangan budidaya ikan air tawar di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Alternatif upaya pengembangan budidaya ikan air tawar yang dilakukan adalah meningkatkan produksi melalui bantuan dari pemerintah, mendirikan koperasi bagi pembudidaya ikan, melakukan pemeriksaan kesehatan ikan secara berkala, memberikan bantuan modal melalui organisasi untuk pembelian peralatan seperti kincir air untuk menaikkan kandungan oksigen dalam air, memperluas daerah pemasaran, mengadakan kerjasama dengan universitas yang memiliki fakultas perikanan. Kepala bagian umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang mengatakan bahwa banyak upaya yang dilakukan oleh dinas perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam mendukung program minapolitan budidaya, berikut pernyataanya :²

“Kami dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan sangat mendukung program minapolitan budidaya sebagai upaya pengembangan budidaya ikan air tawar di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, upaya pengembangan budidaya ikan air tawar yang dilakukan adalah meningkatkan produksi melalui bantuan dari pemerintah, mendirikan koperasi bagi pembudidaya ikan, melakukan pemeriksaan kesehatan ikan secara berkala, memberikan bantuan modal melalui organisasi untuk pembelian peralatan seperti kincir air untuk menaikkan kandungan oksigen dalam air, memperluas daerah pemasaran, mengadakan kerjasama dengan universitas yang memiliki fakultas perikanan”

Program minapolitan budidaya adalah wujud pemberdayaan ekonomi rakyat untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala perkembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat dari ketergantungan ke kemandirian. Kebijakannya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan untuk menjadikan ekonomi yang

² Wawancara Kepala bagian umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan, pukul 09:30 WIB

kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi adalah dengan mendukung program minapolitan budidaya.

Wujud dari dukungan tersebut berupa peluang atau akses yang lebih besar kepada pembudidaya ikan berupa aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi hasil usahatani, peningkatan akses bantuan modal usaha; peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung program minapolitan budidaya. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut diberlakukan dalam upaya mendukung program minapolitan budidaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berikut pernyataannya:¹

“Kami dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan telah memberi peluang atau akses yang lebih besar kepada para pembudidaya berupa aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi hasil usahatani, dalam upaya memudahkan pemasaran hasil usahatani, peningkatan akses bantuan modal usaha; dan peningkatan akses”.

Munculnya pembudidaya ikan di Kecamatan Warkuk ranau Selatan, berawal dari tahun 2009. Dimana, banyak masyarakat setempat yang membuat kolam ikan di area rumah masing-masing hanya saja belum terkoordinir. Kegiatan perikanan masyarakat Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dimulai oleh sebagian pembudidaya pernah melakukan kegiatan budidaya lele, namun hasilnya tidak sebanding dengan biaya perawatannya dan rugi. Akhirnya, memilih ikan nila, mujair, dan gurame karena harga jual untuk komoditi ikan air tawar ini dipasar stabil atau relatif tinggi sehingga menjadi sektor usaha yang menarik untuk dikelola. Penjualan ikan nila, mujair, dan gurame diserahkan kepada tengkulak dengan menghubungi via telepon dengan menimbang hasil panen dan uang penjualan dapat diserahkan langsung atau menunggu seminggu kemudian. Pemasarannya sampai ke Lampung, Muaradua, dan Baturaja.

Pembudidaya ikan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan berada dalam binaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk tim pembinaan untuk para pembudidaya ikan dari Dinas Perikanan dan Peternakan bagian yang membantu adalah bidang kelembagaan dan sumber daya manusia dan bidang budidaya perikanan. Kedua seksi tersebut dibentuk agar para pembudidaya ikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat secara resmi diketahui oleh pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan guna memudahkan penyaluran bantuan.

Program minapolitan budidaya terangkum dalam kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) sebagai sarana penyaluran bantuan langsung masyarakat untuk membangun usaha yang

berkembang bagi seluruh pembudidaya ikan. Tujuan dari pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP). Perikanan Budidaya adalah meningkatkan kemampuan usaha, produksi perikanan budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha serta meningkatkan kualitas lingkungan. Kepala bagian umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang mengatakan bahwa Program minapolitan budidaya terangkum dalam kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB), berikut pernyataannya :²

“Program minapolitan budidaya terangkum dalam kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) sebagai sarana penyaluran bantuan langsung masyarakat untuk membangun usaha yang berkembang bagi seluruh pembudidaya ikan”

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya pada tahun 2017 dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan skala mikro. Selain itu, dirancang untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan dalam mengembangkan usaha produktif dibidang pembudidayaan ikan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, kemampuan, pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha perikanan budidaya.

Berdasarkan potensi sektor perikanan di Kecamatan Warkuk ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki peluang besar sebagai bidang usaha produktif masyarakat.

Untuk memaksimalkan kemampuan dan keterampilan pembudidaya dalam rangka upaya pemberdayaan sangat diperlukan. Kemampuan tersebut diperlukan adanya sumber daya yang mumpuni dan fasilitas bagi agen pembaharu. Fasilitas eksternal yang sudah diperoleh terkait akses teknologi canggih seperti mesin dan penguatan modal.

Melalui agen pembaharu penguasaan terhadap penggunaan teknologi untuk kolam dapat mengembangkan pengetahuan pembudidaya dalam merawat dan memelihara ikan. Selanjutnya, fasilitas yang diperlukan agen pembaharu adalah dukungan modal usaha. Dukungan tersebut digunakan untuk membantu usaha budidaya yang belum maksimal. Pemberian hibah pada tahun pertama dan kredit lunak Bank BRI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai dukungan modal usaha yang membantu para pembudidaya ikan di Kecamatan Warkuk ranau Selatan. Kredit yang diajukan di Bank BRI cocok untuk pembudidaya, karena pengembalian pinjaman pada tahun pertama tidak diberi bunga baru pada tahun kedua dikenakan bunga 5,5%.

¹ Wawancara Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, Pukul 10:30 WIB)

² Wawancara Kepala bagian umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan, pukul 09:30 WIB

Para pembudidaya mendapatkan berbagai bentuk dukungan sebagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Guna meningkatkan kualitas kemampuan dalam memanen ikan yang baik. Para pembudidaya diberikan pembinaan dan informasi berkaitan dengan teknis budidaya. Para pembudidaya yang semula hanya merawat ikan dan mengelola usaha dengan wawasan sederhana yang didapatkan dari pengalaman pribadi, akhirnya bisa berkomunikasi untuk pembinaan atau penyuluhan yang diberikan dalam program pemberdayaan. Walaupun, pembinaan dan penyuluhan kelembagaan yang diberikan sifatnya insidental dan belum berkelanjutan untuk pembudidaya ikan di Kecamatan Warkuk ranau Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukirno selaku masyarakat pembudidaya ikan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan yang mengatakan bahwa para pembudidaya ikan belum memperoleh pelatihan secara menyeluruh. Pelatihan hanya diikuti oleh beberapa pembudidaya saja. Hal tersebut disayangkan, karena pembudidaya yang lainnya juga ingin mendapatkan kesempatan pelatihan yang sama, terutama pada bidang pembenihan bibit ikan. Pelatihan yang diperoleh pun berkala dalam jangka waktu 1 tahun sampai 2 tahun, berikut pernyataannya:¹

“terus terang saja, kami di rasa pelatihan yang dilakukan oleh pihak penyuluh dari Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka mendukung program minapolitan di Kecamatan warkuk ranau Selatan belum merata, pelatihan hanya diikuti oleh beberapa orang saja, dan kamipun tidak tahu kapan pendaftaranya, tahu-tahu sudah ada yang mewakili”

Pentingnya pemberian pengetahuan melalui sosialisasi bagi pembudidaya ikan sebagai sarana untuk lebih mengutamakan kualitas usaha yang digeluti agar semakin berkembang dan mampu membuka usaha ekonomi rumah tangga berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata dinas perikanan dan peternakan Kabupaten OKU sudah melakukan pengarahan pelaksanaan tugas program minapolitan yang telah disampaikan kepada pembudidaya ikan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Adapun cara yang ditempuh Dinas perikanan dan peternakan Kabupaten OKU sebagai komunikator dalam menyampaikan informasi tentang program minapolitan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU antara lain melalui media Komunikasi tatap muka yang dimana suatu bentuk komunikasi yang mempertemukan secara tatap muka pihak komunikator dan komunikan. Pesan disampaikan secara langsung dari komunikator, dan secara langsung dapat langsung menerima umpan balik dari komunikan. Sehingga dapat melihat respon balik atau umpan balik komunikan saat melakukan proses interaksi. Seperti melakukan kegiatan seminar, pelatihan lapangan dan melakukan bimbingan ke keramba atau kolam

pembudidaya ikan yang ada di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Sehingga informasi yang dinas kelautan dan perikanan sampaikan dengan mudah diterima oleh masyarakat dan pembudidaya ikan.

Dinas perikanan dan peternakan melakukan pengarahan pelaksanaan tugas pada saat-saat yang sudah dijadwalkan setiap tahunnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sekali melakukan kegiatan seminar, pelatihan dan bimbingan sehingga sudah terencana oleh Dinas perikanan dan peternakan Kabupaten OKU, selain itu kegiatan juga dilakukan diluar jadwal agar semua keluhan-keluhan pembudidaya ikan dapat segera ditindak lanjuti oleh Dinas perikanan dan peternakan Kabupaten OKU.

Menpengarah pelaksanaan tugaskan program minapolitan kepada masyarakat dan pembudidaya ikan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU karena karakter yang berbeda-beda dalam menerima pesan yang telah disampaikan kepada mereka dan arena suatu informasi atau pesan tidak bisa secara sekaligus diberikan kepada semua pembudidaya ikan dan masyarakat yang ada di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, maka diperlukan bantuan dari masyarakat dan pembudidaya ikan itu sendiri untuk memberitahukan kepada pembudidaya ikan lainnya sehingga informasi yang disampaikan bisa diterima oleh semua masyarakat dan pembudidaya ikan yang ada di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengarahan pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Dinas perikanan dan peternakan dalam melakukan pengarahan pelaksanaan tugas, didapati hasil yang positif dari pembudidaya ikan yakni keaktifan petugas dinas kelautan dan perikanan yang salah satunya untuk mencoba ikut terlibat dalam pelatihan langsung pada bidang perikanan. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian Dinas perikanan dan peternakan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU terhadap pembudidaya ikan yang berada di kawasan minapolitan untuk ikut serta dalam mensukseskan program minapolitan. Dari hasil pengamatan peneliti menilai pengarahan pelaksanaan tugas formal dan informal sudah dijalankan oleh petugas Dinas Kelautan dan perikanan dalam melakukan pengarahan pelaksanaan tugas mengenai program minapolitan untuk pembudidaya ikan dan pengarahan pelaksanaan tugas formal dianggap paling efektif dalam menpengarah pelaksanaan tugaskan program minapolitan karena para pembudidaya mendapatkan seminar dan pelatihan langsung sehingga tercapainya tujuan minapolitan.

Dalam pelaksanaan pengarahan pelaksanaan tugas program minapolitan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten OKU melakukan pengarahan pelaksanaan tugas formal dan informal. Pengarahan pelaksanaan tugas formal yang diselenggarakan Dinas perikanan dan peternakan ditunjukkan ke lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberdayakan masyarakat (dalam rangka pembangunan) pada bidang perikanan. Pengarahan pelaksanaan tugas formal dilakukan agar masyarakat yang menggeluti usaha perikanan lebih terampil dalam pembudidayaan ikan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengarahan pelaksanaan tugas informal yang diterapkan kepada pembudidaya ikan dengan mengarah

¹ Wawancara dengan Bapak Sukirno, pembudidaya ikan di kecamatan Warkuk Ranau Selatan

kepada sikap kekeluargaan yang sifatnya mempererat kekeluargaan antara Dinas perikanan dan peternakandan pembudidaya ikan. hal ini menunjukkan kepedulian Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU terhadap pembudidaya ikan.

Dari hasil wawancara kepada pembudidaya ikan, pengarahannya pelaksanaan tugas informal yang dijalankan oleh petugas dinas kelautan dan perikanan, dengan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan terhadap pembudidaya yang satu dengan lainnya dijalankan dengan sangat profesionalisme. Hal ini ditunjukkan dinas kelautan dan perikanan kepada pembudidaya ikan dapat dilihat seperti melakukan pemantauan langsung Peran Dinas perikanan dan peternakan Menpengarahannya pelaksanaan tugas Minapolitan (Masliana) ke keramba/kolam pembudidaya ikan serta memberi informasi tentang program minapolitan dan perkembangan pasar terhadap bibit ikan dan teknologi terbaru untuk menunjang budidaya ikan. Idealnya petugas menyadari benar bahwasanya sikap kekeluargaan untuk mempererat kedekatan antara kedua belah pihak yang saling memerlukan. Dengan demikian pengarahannya pelaksanaan tugas informal didalam menyampaikan informasi tentang program minapolitan dapat sukses kedepannya seperti yang diharapkan Dinas perikanan dan peternakan Di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU.

Pada Dinas Perikanan dan Peternakan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan menjalankan perannya untuk program minapolitan kepada pembudidaya ikan tidak selalu berjalan baik, yang mana dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapatnya beberapa kesenjangan yaitu berupa kendala yang dihadapi oleh Dinas perikanan dan peternakan dalam mewujudkan program minapolitan kepada pembudidaya ikan terdapat pada masalah yaitu masyarakat yang memiliki pola pikir yang begitu tinggi sehingga keinginan mereka sulit untuk di realisasikan karena membayangkan hal-hal yang belum tentu hasilnya sesuai dengan program minapolitan dikarenakan kurangnya wawasan dan kesadaran yang dimiliki sebgai pembudidaya ikan sehingga dapat menimbulkan kegagalan dalam memproduksi hasil ikan, selain itu masalah lain yaitu sumber daya manusia tenaga kerja yang kurang dalam melakukan penyuluhan, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan bahwa:¹

“Kurangnya tenaga teknis perikanan dan adanya fenomena air yang bau atau bangar dan harga pangan yang tinggi membuat masyarakat sulit untuk membudidaya ikan”.

Sedangkan faktor pendukungnya apabila seluruh pembudidaya ikan mengerti akan adanya program minapolitan dengan terus menerus menerapkan tahapan-tahapan dalam program minapolitan untuk diterapkan membudidaya ikan sehari-hari. Pembudidaya ikan lebih mengerti dan mengetahui daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, maka

¹ Wawancara Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, pukul 10:15 WIB

pembudidaya ikan diberikan penyuluhan, pelatihan, dan koordinasi yang sering dilakukan pada saat melakukan pengarahannya pelaksanaan tugas di seluruh desa di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU.

Berdasarkan pendapat pembudidaya ikan kebanyakan baik tidaknya pengarahannya pelaksanaan tugas yang dijalankan Dinas Perikanan dan Peternakan tergantung dari aparat Dinas Perikanan dan Peternakan itu sendiri, atau dalam skala dilapangan tergantung pada petugas yang berhubungan langsung dengan pembudidaya ikan, sehingga faktor pendukung maupun faktor penghambat peran dinas kelautan dan perikanan dalam menpengarahannya pelaksanaan tugas program minapolitan terletak pada bagaimana petugas dinas itu sendiri didalam menjalankan tugasnya. Komitmen Dinas Perikanan dan Peternakan untuk mewujudkan tugasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan daerah, maka perlu diupayakan percepatan pembangunan pada masing-masing sektor secara efektif dengan memberdayakan potensi kelautan dan perikanan, merupakan salah satu faktor yang mendukung terwujudnya pengarahannya pelaksanaan tugas program minapolitan yang lebih efektif dengan dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh pembudidaya ikan.

4.2.3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam melaksanakan sebuah kebijakan publik. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-sesalahan akan sangat kecil untuk terjadi begitu pula sebaliknya. Koordinasi, dalam aspek koordinasi ini peneliti menanyakan mengenai koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dalam mendukung program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU kepada kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang mengatakan sebagai berikut:²

“Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan kawasannya Minapolitan ini, kami selalu mengkomunikasikan apabila ada bantuan terkait infrastruktur dan keuangan dan selalu merespon setiap masukan yang terjadi dilapangan terkait pelaksanaan program ini”.

Jadi, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan selalu berkoordinasi dengan Semua Dinas-Dinas yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU ini karena memang dinas-dinas itulah yang terjun langsung ke lapangan. Akan tetapi beda halnya ketika peneliti menanyakan terkait

² Wawancara Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, pukul 10:15 WIB

koordinasi kepada Syehrul, S.IP selaku Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKUS, Beliau mengatakan sebagai berikut:¹

“Kami dari pihak Dinas Perikanan dan Peternakan yang menjadi pioneer pelaksanaan Program ini merasakan koordinasi yang kurang baik, contohnya kami dengan dinas Pekerjaan Umum saja kita tidak tau ketika mereka membangun kios-kios yang berdiri di tempat yang kurang strategis, seharusnya pembuatan itu atas rekomendasi dari kami pihak dinas Pertanian, begitu juga dinas yang lain pun sama jadi koordinasi antar SKPD ini sangat kurang baik”.

Ungkapan dari Syehrul, S.IP selaku Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKUS di atas merupakan hal yang nyata dirasakan dalam hal koordinasi di program kebijakan ini, karena hal yang sama dikatakan oleh Purwanto, S. ip. selaku kepala Kepala Bagian Umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKUS, beliau mengatakan sebagai berikut:²

“Koordinasi secara vertikal dan secara horizontal itu yang harus dijaga dan dipelihara secara baik, kalau melihat kondisi sekarang kami selalu mengalami sedikit kebingungan dalam melaksanakan program ini, kami di tuntut untuk mewujudkan kawasan Minapolitan ini sementara dari atas kurang jelas koordinasinya begitu juga antar dinas-dinas yang menangani juga jalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program ini”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Fathan Rasyid, S.Pd selaku Sekretaris Kecamatan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, yang mengatakan sebagai berikut:³

“Saya pun tidak tau menau soal Pengembangan Program Minapolitan ini hanya saja saya pernah dengan bawasana di Kecamatan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan ini digulirkan program Minapolitan seperti itu, pada tahun 2011 lalu ada penelitian dari Dinas Perikanan dan Peternakan mengenai Minapolitan tetapi setelah itu tidak ada kabar yang jelas mengenai program ini, tidak ada koordinasi dari Dinas Perikanan dan Peternakan secara jelas kepada kami”

Menyangkut koordinasi yang buruk ini juga dikeluhkan semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS ini,

¹ Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKUS

² Kepala Bagian Umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKUS

³ Wawancara di kantor Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, pukul 09:00 WIB

seperti di katakana oleh Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan sebagai berikut:⁴

“Saya juga merasakan kalau tingkat koordinasi yang terjalin antar dinas-dinas ini kurang begitu baik, hal ini disebabkan karena ketidak jelasan kebijakan ini saya rasa, sehingga menyebabkan koordinasi yang kurang dalam mewujudkan program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS ini”.

Berdasarkan temuan lapangan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan tidak mengetahui terkait pembangunan kios-kios yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum yang ditujukan untuk mendukung program Minapolitan budidaya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS. Hal itu diungkapkan oleh kepala bidang penyuluhan yang menangani langsung pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan ini. banyak pihak-pihak yang menangani ini tidak tau ataupun tidak ada kejelasan tugas pokok dan fungsinya dan harus berbuat apa. Kedua, sosialisasi. Aspek sosialisasi merupakan bagian dari komunikasi yang bertujuan untuk menjelaskan isi program kepada agen pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima kebijakan hal ini dimaksudkan agar mudah untuk dipahami dan dimengerti dan implementasikan. Untuk mengetahui perihal sosialisasi ke tingkat desa-desa dan warga di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan peneliti menanyakan kepada Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang mengatakan bahwa sosialisasi program Pengembangan kawasan minapolitan, sebagai berikut:⁵

“sosialisasi dulu pernah kita lakukan terkait program ini, tapi memang masih kurang sehingga masyarakat disana itu belum banyak yang tau mengenai program ini kemungkinan hanya pembudidaya ikan saja yang tau mengenai program ini itu pun cuman hanya tau dapat bantuan dari Dinas Perikanan dan Peternakan begitu”

Pernyataan serupa juga di ungkapkan Kepala bagian umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang mengatakan bahwa sosialisasi program Pengembangan kawasan Minapolitan ini lemah :⁶

⁴ Wawancara Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, pukul 10:15 WIB

⁵ Wawancara Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, Pukul 10:30 WIB)

⁶ Wawancara Kepala bagian umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan, pukul 09:30 WIB

“Memang saya akui sosialisasi program ini sangat lemah bahkan kalo kamu ke Kecamatan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan tanya ke warga mengenai Minapolitan saya yakin mereka tidak tau, saya yakin itu karena apa ya memang sosialisasi yang lemah ini menyebabkan keadaan seperti itu terjadi SKPD terkait saya liat belum begitu gereget/dominan lah mereka artinya belum dominan itu masih fokus ke hal-hal yang kelihatannya menurut mereka lebih penting, karena kalo sudah ada greget biasanya mereka sudah mulai gitu, artinya mulai itu begini, katakanlah Minapolitan ini kalo sesuai kajian sudah mulai harus di dukung sepenuhnya gitu ya, peran dinas tata kota misalnya, dinas tata kota tuh kan mengenai PJU misalnya, nah di kawasan sana tuh sudah mulai dihidupkan. Jadi ada sinergi antara SKPD dan ini keliatannya masih belum, mungkin memerlukan waktu ya. Jadi ini peran leading sangat penting menurut saya.”.

Pernyataan sekretaris Kecamatan Warkuk Ranau Selatan yang mengatakan hal sebagai berikut:¹

“saya belum pernah menerima informasi terkait program Minapolitan ini dengan bentuk sosialisasi dari pihak manapun, akan tetapi kalo informasi di Kecamatan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan ini adanya program pengembangan kawasan Minapolitan saya mengetahui akan tetapi kalo sosialisasi yang menjelaskan detail program ini belum pernah”.

Pernyataan serupa juga diungkapkan Sukirno selaku masyarakat pembudidaya ikan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak tau apa itu Minapolitan yang saya tau kami mendapat bantuan bibit-bibit ikan setelah itu kami mendapatkan bantuan pompa air kata orang Kecamatan itu bantuan karena di kecamatan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dijadikan kawasan Minapolitan begitu, tetapi Minapolitan yang seperti apa tidak tahu”.

Hal yang sama ketika peneliti menanyakan ke Erli Badri selaku kepala Desa Kota Batu yang mengatakan:²

“Minapolitan itu seperti apa tidak terlalu paham saya karena sosialisasi ataupun pemberitahuan dari Dinas Perikanan dan Peternakan tidak ada begitu, jadi saya pun ketika adek tanya saya tidak tau harus menjawab apa, saya cuma bisa jawab kalo warga sini pernah mendapat bantuan dan itu dari program Minapolitan begitu tapi

selebihnya kami tidak tau, kurang paham mengenai program ini”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai koordinasi antar organisasi, peneliti menilai bahwa tingkat koordinasi yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan belum terjalin dengan baik dan belum mengkomunikasikan dengan maksimal. Hal ini terlihat dengan bukti-bukti di lapangan yang menunjukkan tingkat koordinasi yang buruk dan dikeluhkan semua pihak-pihak yang menangani program ini. Kemudian tingkat sosialisasi yang sama buruknya terjadi dibagian sosialisasi program ini. Masyarakat yang menjadi target kebijakan ini pun tidak mengetahui kalau ada program Minapolitan ini. Bagaimana mau menunjukkan keberhasilan kalau sosialisasi semacam ini terus berlarut-larut tidak kunjung diperbaiki oleh pihak pihak yang bertanggung jawab terkait telaksananya program ini. Sosialisasi yang baik harus menjadi pioner utama dalam menjalankan sebuah kebijakan agar mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dan sesuai yang diharapkan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan ini bukanlah berasal dari formulasi masyarakat setempat yang mengenai betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Akan tetapi kebijakan ini diambil secara top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan yang sebenarnya masyarakat. Program Pengembangan kawasan Minapolitan merupakan program yang menggunakan pendekatan top down, artinya program ini tersebut dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten OKU Selatan. Keberhasilan program tersebut diraih apabila mendapatkan dukungan penuh serta persetujuan para stakeholder yang terlibat dalam hal ini para agen pelaksana, salah satunya adalah Rinail, S.E, Penyuluh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang mengatakan bahwa:³

“Saya pribadi sangat mendukung dengan adanya program ini, karena masyarakat pembudidaya ikan dapat meningkatkan hasil panen mereka dengan metode-metode yang baru serta mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan usaha mereka”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang memberikan dukungan sebagai berikut:⁴

“Kami selaku pihak dari Dinas Perikanan dan Peternakan sangat senang dengan adanya program pengembangan kawasan Minapolitan ini yang mana banyak pihak yang terlibat di

¹ Sekretaris Camat Kecamatan Warkuk Ranau Selatan pukul 10:30 WIB)

² Wawancara kepala Desa Kota Batu di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, pukul 09:00 WIB

³ Rinail, S.E, Penyuluh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan Dinas Perikanan dan Peternakan (wawancara di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan pukul 11:00)

⁴ Wawancara Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, pukul 10:15 WIB

dalamnya, karena masyarakat khusus ya Warkuk ranau selatan ini dan kabupaten OKU Selatan umumnya dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu roda penggerak perekonomian.”

Dukungan positif juga dinyatakan oleh Kepala bagian umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan yang mengatakanebagai berikut:¹

“Kami selaku pihak kecamatan Warkuk ranau selatan ini sangat senang dan mendukung dengan adanya program pengembangan kawasan Minapolitan, karena dengan adanya kebijakan ini masyarakat Warkuk ranau selatan ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten OKU Selatan dengan memberdayakan pembudidaya ikan yang berada di Warkuk ranau selatan ini ini, maka dengan adanya program ini pihak kecamatan Warkuk ranau selatan ini pun ikut andil dalam mengawasi program tersebut agar terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang diharapkan”.

Dukungan serupa juga dikatakan oleh Sri Hartati, SE selaku kepala seksi UPT Dinas Perikanan dan Peternakan Kecamatan Warkuk ranau selatan yang mengatakan sebagai berikut:²

“Saya selaku kepala seksi UPT Dinas Perikanan dan Peternakan Kecamatan Warkuk ranau selatan ini sangat mendukung sekali dengan adanya program pengembangan kawasan Minapolitan ini, dengan cara mengurus segala hal bentuk bantuan apapun hal-hal yang terkait program ini yang turun dari Perikana dan Peternakan”.

Dukungan positif juga dikatakan oleh Syehrul, S.IP selaku kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan PeternakanKabupaten OKU Selatan mengatakan sebagai berikut:³

“Saya selaku selaku kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan PeternakanKabupaten OKU Selatan dan sebagai pelaksana program Minapolitan ini ikut langsung mensukseskan

program tersebut dan sangat merespon dengan baik agar pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dapat mencapai hasil yang diharapkan”. (wawancara di kantor Dinas Perikanan dan PeternakanKabupaten OKU Selatan, pukul 10:25WIB)

Dari beberapa hasil wawancara di atas mengenai aspek disposisi (dukungan dan persetujuan) maka peneliti menganalisis, peneliti menilai bahwa beberapa agen pelaksana sepenuhnya mendukung program pengembangan kawasan Minapolitan. Alasannya yakni karena program tersebut dapat membantu masyarakat pembudidaya ikan dalam meningkatkan hasil produksinya dan dapat menjadikan Kecamatan Warkuk ranau selatan ini menjadi sentra produk pertanian. Jadi dengan adanya dukungan dari semua pihak baik dari agen pelaksana maupun dari luar agen pelaksana diharapkan pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan ini bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan yang diharapkan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data di lapangan diketahui bahwa:

1. Program minapolitan ini belum dapat berjalan sehingga keadaan masyarakatnya belum mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut, hal ini dapat di katakana bahwa program ini sangat baik akan tetapi pelaksanaannya tidak. Ukuran dan tujuan kebijakan ini harus dipahami oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan, bukan hanya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan saja melainkan dukungan dan pemahaman mengenai program Minapolitan ini harus dipahami dan didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Minapolitan ini.
2. Mengenai aspek Pengarah pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan dalam mendukung program Minapolitan budidaya di pemerintahan daerah Kabupaten dan Dinas-Dinas terkait pelaksana program pengembangan kawasan Minapolitan ini dirasa sudah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Akan tetapi itu dari segi kemampuan saja untuk pelaksanaannya petugas lapangan seperti pendamping lapangan dan monitoring ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan kemudian jumlah petugas yang kurang ini menjadi kendala dari instansi pelaksana program Minapolitan ini.
3. Kurangnya sumberdaya dalam kebijakan minapolitan ini juga dikeluhkan oleh kepala bidang penyuluhan beserta staffnya dalam menangani program pengembangan kawasan Minapolitan ini walapun mereka sudah bekerja

¹ Wawancara Kepala bagian umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan, pukul 09:30 WIB (wawancara di Kantor Kecamatan Warkuk ranau selatan ini, pukul 09:30 WIB)

² wawancara *selaku kepala seksi UPT Dinas Perikanan dan Peternakan Kecamatan Warkuk ranau selatan* di Kantor Upt Perikanan dan Peternakan warkuk ranau selatan ini, pukul 09:00 WIB.

³ Syehrul, S.IP, kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perikanan dan PeternakanKabupaten OKU Selatan

secara maksimal. Terkait petugas penyuluh lapangan ataupun pendamping yang ada di Warkuk Ranau Selatan yang kurang melakukan penyuluhan dan monitoring ke lapangan ini juga menjadi kendala terlaksananya program kebijakan ini menjadi baik. Dalam sumberdaya waktu ini memang ada beberapa pernyataan yang berbeda dalam menialai tetang rentang waktu ataupun target dari pelaksanaan program pengembangan Kawasan Minapolitan ini. Dinas Perikanan dan Peternakan menilai sudah cukup waktu target yang di tetapkan.

4. Dari aspek disposisi (dukungan dan persetujuan) maka peneliti menilai bahwa beberapa agen pelaksana sepenuhnya mendukung program pengembangan kawasan Minapolitan. Alasannya yakni karena program tersebut dapat membantu masyarakat pembudidaya ikan dalam meningkatkan hasil produksinya dan dapat menjadikan Kecamatan Warkuk ranau selatan ini menjadi sentra produk pertanian. Jadi dengan adanya dukungan dari semua pihak baik dari agen pelaksana maupun dari luar agen pelaksana diharapkan pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan ini bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan yang diharapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pihak kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Beberapa hal dimaksud meliputi:

1. Program Minapolitan ini masih perlu ditingkatkan lagi supaya masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut
2. Pengarahan dan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan dalam mendukung program Minapolitan budidaya di pemerintahan daerah Kabupaten dan Dinas-Dinas terkait pelaksana program pengembangan kawasan Minapolitan ini perlu ditingkatkan lagi dan kemudian jumlah petugas dari instansi pelaksana program Minapolitan ini perlu ditambah lagi.
3. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan minapolitan ini juga perlu ditambah lagi bekerja supaya program minapolitan ini dapat terlaksana secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

Cangara, Hafied. 2006. *Pengantar Ilmu komunikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKUS Tahun 2013

Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gava Media.

Effendy, Onong. 2013. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Morissan. 2015. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta Prenamedia Group.

Rustiadi, *et al.* 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soerjono, Soekonto. 2009. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sri Suwitri. 2011. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penertbit Universitas Diponegoro

Yulisti, M dan Triyanti, R. Peran Kelembagaan Dalam Mendukung Program Minapolitan Budidaya di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan *Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 7 No. 1, 2012*.

Zainal, et al. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahar in Negara Republik Indonesia Nomor .

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Rencana Induk Pengemb. Kawasan Minapolitan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 13 Tahun 2012